

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil regresi data panel mengenai pengaruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan (Indeks Williamson) yang mencakup setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2011-2017 berkisar antara 0,026 sampai 0,465. tahun 2017 Ketimpangan tertinggi yaitu Kota Yogyakarta dengan nilai 0.465 persen hal ini dikarenakan karena Kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk yang relatif tinggi dan pendapatan perkapita yang juga tinggi dan merupakan pusat ekonomi dan pusat pemerintahan Provinsi D.I. Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Sleman mempunyai ketimpangan terendah hanya 0.036 persen.
2. Berdasarkan hasil pengujian maka pengaruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.

3. Berdasarkan hasil pengujian maka pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.
4. Berdasarkan hasil pengujian maka pengaruh pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.
5. Berdasarkan hasil pengujian maka Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.
6. Berdasarkan hasil pengujian variasi variabel ketimpangan pendapatan di provinsi D.I. Yogyakarta mampu dijelaskan oleh variabel UMKM, TPAK, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM sebesar 99%. Sedangkan sisanya sebesar 1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka yang diberikan peneliti pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pengembangan UMKM di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan cara pelatihan-pelatihan pada setiap Kab/Kota agar UMKM semakin berkembang pada wilayah tersebut dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

2. Indeks Pembangunan Manusia berdampak meningkatkan ketimpangan pendapatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, karena komponen IPM banyak, maka pemerintah perlu untuk mengkaji lebih dalam agar program-program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan IPM tepat sasaran. Misalnya, dengan cara meningkatkan pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas Indeks pembangunan Manusia.
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel yang lebih bervariasi agar bisa mewakili faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan.